

## PENGARUH KOMPETENSI SUMBERDAYA MANUSIA, GOOD GOVERNANCE DAN E-GOVERNMENT TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

Aditya Yudha Prawira Purnomo

adityaypp123@gmail.com

Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### ABSTRACT

*Financial statement becomes essential thing for both local and state government, since it gives evidence for society that government has managed its finance properly, well, and accountably. Therefore, this research aimed to examine the effect of human resource competence, Good Governance, and E-Government on the quality of local government's financial statement. The research was casual-comparative. While, the population was Local Government Agency. Meanwhile, the data collection technique used random sampling. Moreover, the data were local government's financial statement. Furthermore, the instrument used survey and questionnaires. In addition, the data analysis technique used multiple linear regression with SPSS 25. The research result concluded human resource competence had positive effect on the quality of local government's financial statement. Likewise, Good Governance had positive effect on the quality of local government's financial statement. Similiar to human resource competence and Good Governance, e-government had positive effect on the quality of local government's financial statement.*

*Keywords: Human Resource Competence, Good Governance, E-Government, Quality of Local Government's Financial Statement*

### ABSTRAK

Laporan keuangan wajib dibuat oleh pemerintah, baik itu pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Hal ini sebagai bukti kepada masyarakat bahwa pemerintah telah mengelola keuangan negara dengan handal, baik dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari kompetensi sumber daya manusia, *good governance*, dan *e-government* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jenis penelitian adalah penelitian kausal komparatif (*causal-comparative research*). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *Random Sampling*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan cara metode survei dengan menggunakan kuesioner. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 25. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia *good governance*, dan *e-government* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

**Kata Kunci** :Kompetensi Sumber Daya Manusia, *Good Governance*, *E-government*, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

### PENDAHULUAN

Pemerintah menjalankan otonomi daerah dengan memberikan wewenang kepada setiap pemerintah daerah. Kewenangan untuk menjalankan roda pemerintahannya di tiap-tiap daerah tersebut salah satunya adalah daerah dapat mengusulkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) kepada dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dan ketika sudah disetujui oleh DPRD akan ditetapkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dengan peraturan daerah.

Seluruh anggaran yang diajukan baik pemerintahan pemerintah pusat maupun daerah berkewajiban untuk membuat laporan keuangan sebagai bukti kepada masyarakat bahwa

telah mengelola keuangan negara yang handal, baik dan akuntabel. Hal tersebut untuk dinilai apakah pemerintah pusat maupun daerah berhasil menjalankan tugas dengan baik atau tidak. Laporan Keuangan pemerintah pusat maupun daerah akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada akhir masa periode dan akan dipeertanggung jawabkan kepada DPR RI untuk pemerintah pusat dan DPRD untuk pemerintah daerah atas semua kinerja dan realisasi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah.

Pemerintah pusat maupun daerah dituntut agar pengelolaan keuangan secara baik yang harus dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*), dimana pengelolaan keuangan yang baik adalah bukti dari kemampuan pemerintah dalam mengontrol kebijakan-kebijakan terkait keuangan secara ekonomis, efisien, transparan dan akuntabel. Laporan keuangan yang baik akan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian oleh BPK. Sedangkan apabila ditemukan hal yang kurang sesuai maka akan mendapatkan opini lain selain wajar tanpa pengecualian. Masih banyak hasil audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah yang mendapatkan opini selain WTP yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Hasil Pemeriksaan BPK atas 542 laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2017 mengungkapkan opini WTP atas 411 Laporan keuangan pemerintah daerah (76%), opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 113 (21%) laporan keuangan pemerintah daerah dan opini Tidak menyatakan pendapat atau TMP atas 18 laporan keuangan pemerintah daerah (3%). Berdasarkan tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai oleh 33 dari 34 pemerintah provinsi (97%), 298 dari 415 pemerintah kabupaten (72%), dan 80 dari 93 pemerintah kota (86%). Berdasarkan atas opini tersebut tidak semua daerah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Beberapa daerah masih mendapatkan opini selain wajar tanpa pengecualian. Berkaitan dengan ini maka membuat laporan keuangan yang berkualitas sehingga mendapatkan opini wajar tidaklah mudah karena terdapat aturan aturan yang harus dipatuhi dan telah diatur dalam PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah serta harus efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pemerintah Kota Surabaya yang menjadi objek dalam penulisan ini turut serta menjalankan PP No.71 Tahun 2010 karena termasuk dalam entitas Pemerintah Daerah yang juga berkewajiban untuk membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Selama ini audit laporan keuangan yang diterima oleh pemerintah Kota Surabaya mendapatkan status Wajar Tanpa Pengecualian. Kemampuan pemerintah Kota Surabaya menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti Sumber Daya Manusia (Ekasari, 2012). Kemudian Faktor lain yang dimungkinkan berdampak pada kualitas penyajian laporan keuangan adalah *good governance*. Selanjutnya melalui faktor *e-government* pula dapat menguatkan transparansi publik oleh masyarakat. Peningkatan transparansi dapat dilihat dari ketersediaan suatu informasi dan kemudahan dalam memperoleh informasi tersebut untuk publik.

Dari adanya fenomena yang berkaitan dengan predikat opini yang terjadi pada data di pemerintahan Kota Surabaya maka peneliti ingin mengetahui adanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan, selain itu menginginkan adanya gambaran serta fakta yang otentik terkait kualitas laporan keuangan yang terjadi pada pemerintahan daerah khususnya di organisasi perangkat daerah yang ada di Kota Surabaya terkait faktor internal misalnya Kompetensi Sumber Daya Manusia, *Good Governance*, dan *E-Governance*

## TINJAUAN TEORITIS

### Teori Agensi

Terjadinya agensi, jika satu atau lebih orang (*principal*) yang bekerja kepada orang lain (*Agent*) untuk memberikan sesuatu jasa serta mendelegasikan wewenang dalam pengambilan keputusan merupakan salah satu teori keagenan (*Agency Theory*). Salah satu

pihak (*principal*) membuat suatu kontrak baik eksplisit maupun implisit dengan pihak lain yaitu agent dengan bertindak sesuai dengan yang diinginkan oleh *principal*.

Hubungan antara *principal* dan *agent* dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi (*Asymmetrical Information*) karena *agent* berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan *principal*. Pemerintah daerah sebagai agen akan menghindari resiko berupa ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja mereka. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan berusaha untuk menunjukkan bahwa kinerja mereka selama ini baik dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah (Safitri, 2009).

### **Stewardship Theory**

*Stewardship theory* menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Sejak awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *stewards* dengan *principals*. Semakin kompleks bertambahnya tuntutan akan akuntabilitas pada organisasi sektor publik, *principal* semakin sulit untuk melaksanakan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan. Pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaan menjadi semakin nyata

Kontrak hubungan antara *stewards* dan *principals* atas dasar kepercayaan bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi, sehingga model yang sesuai pada kasus organisasi sektor publik adalah *stewardship theory*. Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi Pemerintah Daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat.

### **Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)**

Kompetensi sumber daya pegawai penatausaha keuangan dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan akuntansi akan memberikan kontribusi dalam menghasilkan laporan keuangan. Kompetensi sendiri dapat diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, dan kemampuan. Menurut Wibowo (2016:271) kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) No 46A Tahun 2007 indikator kompetensi sumber daya manusia adalah :

- a. Pengetahuan
- b. Keterampilan
- c. Sikap

### **Good Governance**

*Good Government Governance* merupakan penyelenggaraan manajemen pembangunan secara solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan kerangka politik (*political framework*) bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Menurut Mardiasmo (2005:114) menyatakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*, dimana pengertian dasarnya adalah tata kelola pemerintahan yang baik.

Penerapan *good governance* menuntut pemerintah untuk dapat memberikan informasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip utama yaitu (Mardiasmo ,2006) :

- a. Transparansi (*Transparency*)
- b. Akuntabilitas (*Accountability*)

- c. Resposibilitas (*Responsibility*)
- d. Independensi (*Independency*)
- e. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

### ***E-Government***

*Electronic Government* atau yang biasa disebut *E-Government* adalah penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif, serta memberikan pelayanan publik yang transparan dan memuaskan kepada masyarakat. Sistem pemerintahan daerah sekarang ini sudah mulai diintegrasikan dalam suatu teknologi yang dapat dikendalikan dari pusat pemerintahan. Sebagai contoh adalah dengan adanya penerapan *e-government* yang mulai diterapkan di Indonesia.

Konsep dari pengembangan *e-government* akan menentukan prioritas pengembangan *e-government* suatu lembaga pemerintah yang melahirkan model hubungan *Government to Government* (G2G), *Government to Business* (G2B), *Government to Employees* (G2E) dan *Government to Citizen* (G2C). Dalam menerapkan *e-government* dibutuhkan adanya dukungan secara non-teknis berupa beberapa langkah-langkah yang penting di dalam penerapan *e-government* itu sendiri menggunakan elemen penunjang, Yosefrenaldi (2008) berpendapat ada beberapa indikator yang dapat mempengaruhi pelaksanaan *e-government* adalah:

- a. Komputer serta perangkat lunak lainnya yang dapat digunakan secara optimal.
- b. Menggunakan aplikasi software dalam perangkat lunak.
- c. dalam setiap proses akuntansi dilakukan dengan komputerisasi.
- d. adanya integrasi dalam setiap laporan akuntansi dan manajerial
- e. adanya perawatan secara berkala terhadap perangkat yang digunakan

### **Kualitas Laporan Keuangan**

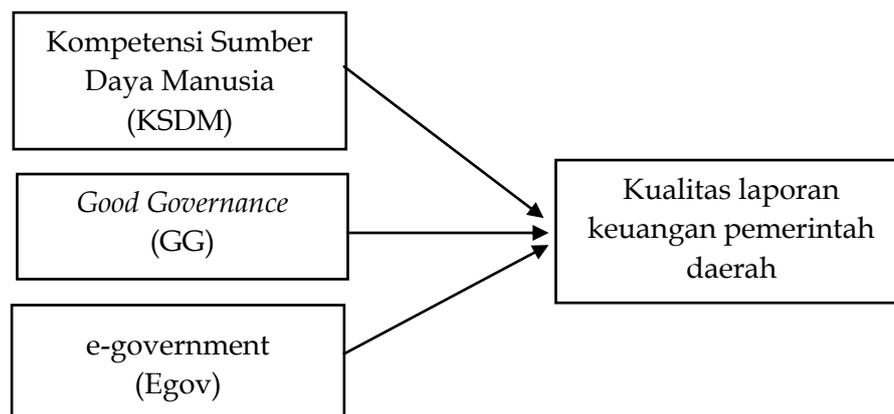
Laporan keuangan pemerintah daerah adalah bagian dari proses pelaporan keuangan dalam pemerintah daerah yang mempresentasikan secara terstruktur posisi keuangan dari transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pemerintah daerah (Bastian, 2005). Menurut Erlina (2015:25) menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan daerah adalah ukuran orang yang menilai atau merinci dari suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan transaksi ekonomi yang menyatakan aktivitas yang berhubungan dengan uang dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintahan daerah.

Adanya ukuran-ukuran normatif dalam mewujudkan informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan yang ingin dicapai merupakan salah satu definisi dari karakteristik kualitatif dalam laporan keuangan (Nordian, 2014:44). Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Berikut adalah 4 karakteristik kualitatif laporan keuangan:

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat Dibandingkan
4. Dapat Dipahami

### **Rerangka Pemikiran**

Dalam kerangka pemikiran dengan tujuan menganalisis pengaruh dari kompetensi sumber daya manusia, *good governance*, *e-government* yang merupakan variabel bebas terhadap kualitas dalam laporan keuangan pada pemerintahan daerah sebagai variabel terikat. Dengan obyek yang diteliti berupa organisasi perangkat daerah di Kota Surabaya.



**Gambar 1**  
**Rerangka Pemikiran**

### **Pengembangan Hipotesis**

Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya yang dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi lebih memungkinkan untuk memberikan layanan yang konsisten dan berkompotensi tinggi. Semakin bagus kompetensi sumber daya manusia yang di miliki maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang di hasilkan. Apabila sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi tidak memiliki kompetensi yang disyaratkan, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi, dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi, kualitasnya menjadi buruk. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai.

H<sub>1</sub>: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

*Good Government Governance* merupakan penyelenggaraan manajemen pembangunan secara solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan kerangka politik (*political framework*) bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Dengan adanya tata kelola pemerintahan yang baik menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah juga baik dan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga baik, karena merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat. Berdasarkan pengertian diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kesuma *et al.*, (2017) dengan hasil menunjukkan bahwa *good governance* mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H<sub>2</sub>: *Good governance* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penerapan *e-government* merupakan upaya pemerintah dalam memanfaatkan teknologi informasi aplikasi internet berbasis *web*, peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga memudahkan proses transformasi dari pejabat publik kepada masyarakat umum. Adanya teknologi informasi menunjukkan bahwa pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan/ ketepatan masuk operasi maupun predikatnya sebagai mesin multiguna, *multiprocessing*. Salah satu dari komponen teknologi informasi adalah komputer, dimana merupakan salah satu dari bagian terpenting dalam mendorong peningkatan kualitas

informasi. Oleh karena itu dibutuhkan teknologi informasi yang lebih efisien serta efektif, sehingga dalam setiap penyusunan laporan keuangan daerah yang dilakukan secara manual dianggap sudah tidak efektif dan efisien, serta dapat dinilai bahwa penyusunan laporan keuangannya kurang handal serta dianggap kurang akurat, hal ini akan berdampak resiko akan kesalahannya. Berdasarkan pengertian diatas akan mendukung penelitian Landau dan Nurannisa (2018) dengan hasil menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi atau *e-government* mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

H<sub>3</sub>: *E-government* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan berupa penelitian kausal komparatif (*causal comparative research*) dengan tujuan yang diharapkan guna mengetahui sebab dan akibat hubungan serta pengaruh antar variabel (Rahayu dan Bida, 2018).

Oleh sebab itu dari penelitian ini dapat menjelaskan dimana variabel bebas yang terdiri dari kompetensi sumber daya manusia, *good governance*, penerapan *e-government* dalam mempengaruhi kualitas dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan variabel terikat. Dimana pendekatan yang digunakan menitikberatkan dalam pengujian hipotesis yang merupakan pendekatan kuantitatif. Organisasi perangkat daerah (OPD) pada Kota Surabaya sebagai populasi dalam penelitian ini.

### **Teknik Pengambilan Sampel**

Populasi dari penelitian ini merupakan organisasi perangkat daerah (OPD) yang terdapat pada pemerintah Kota Surabaya sebanyak 74 OPD yang terbagi antara lain Sekertariat DPRD, Inspektorat, 22 Dinas, 5 Badan, 10 Bagian, 2 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), 2 Badan Layanan Umum Daerah) 31 Kecamatan. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode teknik *random sampling* yang merupakan pengambilan sampel secara acak dengan mengecualikan strata/ tingkatan dalam anggota populasinya

### **Teknik Pengumpulan Data**

Data yang ada dalam penelitian ini terdiri dari opini, sikap, pengalaman maupun karakteristik dari responden sebagai subyek dalam penelitian ini, selain itu menggunakan kuesioner untuk mendapatkan data yang dibagikan kepada responden juga merupakan data primer artinya data diperoleh secara langsung dari responden yang menjadi subyek penelitian.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan cara metode survei dengan menggunakan kuesioner. Metode survei merupakan cara pengumpulan data di mana peneliti atau pengumpul data mengajukan pertanyaan kepada responden baik dalam bentuk lisan maupun secara tertulis (Sanusi, 2014:105). Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2014:199). Pada penelitian ini menggunakan kuisisioner penelitian terdahulu dari Pujanira (2017) dengan judul penelitiannya Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY, menggunakan kuisisioner penelitian terdahulu Tambunan dan Liston (2010) Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance terhadap Efektivitas Kerja Pegawai dan menggunakan kuisisioner penelitian terdahulu dari Yosefrenaldi (2008) dengan judul penelitiannya pengaruh kapasitas intelektual sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening sistem pengendalian intern

### **Definisi Operasional Variabel**

#### **Kompetensi sumber daya manusia**

Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner, dengan model *skala likert*. Menurut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) No 46A Tahun 2007 terdapat 3 indikator yang mempengaruhi kompetensi sumber daya manusia yaitu:

- a. Pengetahuan (*knowledge*).
- b. Keterampilan (*skill*)
- c. Sikap (*attitude*).

#### **Good Governance**

*Good governance* merupakan penyelenggaraan manajemen pembangunan secara solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan kerangka politik (*political framework*) bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner, dengan model *skala likert*. Menurut Mardiasmo (2006) Terdapat 5 indikator yang mempengaruhi *good governance* yaitu:

- a. Transparansi (*transparency*).
- b. Akuntabilitas (*accountability*).
- c. Resposibilitas (*responsibility*).
- d. Independensi (*independency*).
- e. Kesetaraan dan Kewajaran (*fairness*).

#### **E-Government**

*E-government* adalah penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif, serta memberikan pelayanan publik yang transparan dan memuaskan kepada masyarakat. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner, dengan model *skala likert*. Menurut Yosefrenaldi (2008), menyatakan terdapat lima indikator yang dapat mempengaruhi *e-government* adalah:

- a. Penggunaan secara optimal dari komputer dan perangkat lunak;
- b. Aplikasi software yang digunakan;
- c. Proses akuntansi secara komputerisasi;
- d. Laporan akuntansi dan manajerial yang teritegrasi;
- e. Perawatan perangkat yang digunakan

#### **Kualitas Laporan keuangan**

Kualitas laporan keuangan daerah adalah ukuran orang yang menilai atau merinci dari suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan transaksi ekonomi yang menyatakan aktivitas yang berhubungan dengan uang dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintahan daerah. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner, dengan model *skala likert*. Dalam PP No. 71/ Th 2010, ada empat indikator dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan antara lain:

- a. Relevan.
- b. Andal.
- c. Dapat dibandingkan.
- d. Dapat dipahami.

#### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode analisis yang dimana perhitungannya menggunakan SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 25 yang bertujuan untuk menentukan pengaruh kompetensi sumber daya manusia, *good governance* dan *e-government* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### **Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum terhadap objek yang diteliti, statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan suatu data dari sisi rata-rata (*mean*), standar deviasi (*standard deviation*), serta dilihat dari nilai minimum serta maksimum dari masing-masing variabel dalam penelitian ini (Ghozali, 2011: 67). Pengujian ini dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel dan untuk mempermudah memahami variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

### **Analisis Regresi Linier Berganda**

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah kompetensi sumber daya manusia, *good governance*, *e-government* dan pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh tiap variabel independen terhadap variabel dependen.

Tes statistik regresi berganda dengan menggunakan model sebagai berikut :

$$KP = \alpha + \beta_1 \text{KSDM} + \beta_2 \text{GG} + \beta_3 \text{EGov} + \varepsilon$$

Dimana :

KP	: Kualitas Laporan Keuangan
$\alpha$	: Konstanta
KSDM	: Kompetensi Sumber Daya Manusia
GG	: <i>Good Governance</i>
EGov	: <i>E-Government</i>
$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$	: Koefisien Regresi
$\varepsilon$	: <i>Error</i>

### **Pengujian Model**

Sebelum pengujian hipotesis dengan tujuan mengetahui hubungan variabel hubungan variabel kompetensi sumber daya manusia, *good governance*, penerapan *e-government* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, terlebih dahulu dilakukan pengujian model yang terdiri dari uji kelayakan model (F) dan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ).

#### **Uji Kelayakan Model (Uji F)**

Uji F digunakan untuk menguji model. Langkah - langkah dalam uji F dijelaskan sebagai berikut :

1. Perumusan hipotesis :  
H0 : Model dikatakan tidak fit.  
H1 : Model dikatakan fit.
2. Menentukan taraf signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 0.05
3. Memperoleh nilai Sig-F dengan menggunakan program SPSS

#### 4. Penarikan kesimpulan

jika nilai Sig-F < 0.05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima

Jika nilai Sig-F  $\geq$  0.05, maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak

#### Koefisien determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk mengetahui tingkat ketepatan perkiraan dalam analisis regresi. Pengujian ini mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap naik turunnya variasi nilai variabel dependen. Tingkat ketepatan regresi dinyatakan dalam koefisien determinasi majemuk ( $R^2$ ) yang nilainya antara 0 sampai dengan 1 ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ). Semakin besar nilai  $R^2$ , maka semakin besar variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independen. Sebaliknya, makin kecil nilai  $R^2$ , maka semakin kecil variasi variabel dependen yang dapat di jelaskan oleh variasi variabel independen.

#### Uji Hipotesis

##### Uji Statistik t

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Cara melakukan uji t dapat dilihat dari tingkat probabilitas signifikansi dengan batasan nilai yang ditentukan adalah 0,05 ( $\alpha=5\%$ ). Menurut (Ghozali, 2011:87) menjelaskan diterima atau ditolaknya hipotesis adalah:

Tingkat probabilitas untuk t lebih besar ( $> 0,05$ ), dapat dikatakan  $H_0$  diterima untuk  $H_1$  ditolak, yang dapat diartikan variabel kompetensi sumber daya manusia, *good governance*, *e-government* tidak dapat berpengaruh signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tingkat probabilitas untuk t lebih kecil ( $< 0,05$ ), maka  $H_0$  ditolak  $H_1$  diterima. Berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

#### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pemerintah daerah yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Surabaya sebagai subjek penelitian dan 74 OPD yang terdiri dari Sekertariat DPRD, Inspektorat, 22 Dinas, 5 Badan, 10 Bagian, 2 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), 2 Badan Layanan Umum Daerah) 31 Kecamatan dibawah naungan Pemerintah Kota Surabaya sebagai objek penelitian. Berdasarkan metode pemilihan sampel yang digunakan kuisioner yang kembali ke peneliti 114 kuisioner dari 50 OPD. Daftar nama OPD tersaji pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1  
Hasil OPD Mengisi Data Penelitian

No	Nama Organisasi Perangkat Daerah
1	Badan Kepegawaian dan Diklat
2	Badan Penanggulangan Bencana dan Linmas
3	Badan pengelola keuangan dan pajak daerah
4	Badan perencanaan pembangunan
5	Bagian administrasi pemerintah dan otonomi daerah
6	Bagian layanan pengadaan & pengelolaan aset
7	Bagian organisasi
8	Bagian umum dan protokol

- 9 Dinas kebersihan dan ruang terbuka hijau
- 10 Dinas kepemudaan dan olah raga
- 11 Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
- 12 Dinas kesehatan
- 13 Dinas ketahanan pangan dan pertanian
- 14 Dinas koperasi dan usaha mikro
- 15 Dinas pekerjaan umum bina marga dan pematusan
- 16 Dinas pelayanan modal pelayanan terpadu satu pintu
- 17 Dinas pendidikan
- 18 Dinas perdagangan
- 19 Dinas perhubungan
- 20 Dinas perlindungan penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- 21 Dinas perpustakaan dan kearsipan
- 22 Dinas perumahan rakyat & kawasan pemukiman cktr
- 23 Dinas sosial
- 24 Dinas tenaga kerja
- 25 Dinas Pemadam kebakaran
- 26 Satuan Polisi Pamong Praja
- 27 Sekretariat Dewan
- 28 Inspektorat
- 29 Kecamatan asemrowo
- 30 Kecamatan benowo
- 31 Kecamatan gayungan
- 32 Kecamatan genteng
- 33 Kecamatan gubeng
- 34 Kecamatan gunung anyar
- 35 Kecamatan jambangan
- 36 Kecamatan kenjeran
- 37 Kecamatan krembangan
- 38 Kecamatan mulyorejo
- 39 Kecamatan pabean cantian
- 40 Kecamatan pakal
- 41 Kecamatan rungkut
- 42 Kecamatan sambikerep
- 43 Kecamatan semampir
- 44 Kecamatan simokerto
- 45 Kecamatan sukolilo
- 46 Kecamatan tambaksari
- 47 Kecamatan tandes
- 48 Kecamatan tegalsari
- 49 Kecamatan wiyung
- 50 Kecamatan wonocolo

---

Sumber: Primer Data diolah, 2019

### **Deskriptif Hasil Penelitian**

Kuesioner yang di sebar oleh peneliti mulai tanggal 16 Juli 2019 - 6 Agustus 2019. Banyaknya kuesioner yang disebar untuk penelitian ini yaitu 148. Sedangkan kuesioner yang

diterima kembali dan dijawab dengan lengkap dengan jumlah 114 kuesioner dimana terdapat 34 kuesioner yang hilang.

**Tabel 2**  
**Populasi dan Sampel**

<b>Kuesioner</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Prosentase</b>
Kuesioner terdistribusi	148	100%
Kuesioner Hilang	34	22,97%
Kuesioner yang diperoleh kembali	114	77,03%

Sumber : Primer Data diolah, 2019

### **Deskriptif Karakteristik Responden**

**Tabel 3**  
**Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

<b>No</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Prosentase</b>
1	SMA/Sederajat	29	25.4%
2	Diploma	6	5,3%
3	Strata 1	72	63.2%
4	Strata 2	7	6.1%
5	Strata 3	0	0%
Jumlah		114	100%

Sumber : Primer Data diolah, 2019

Dari tabel 3 diatas informasi yang di dapat bahwa responden terbanyak yaitu dari jenjang pendidikan Strata 1 (S1) 63,2%, Sekolah Menengah Atas (SMA) 25,4%, Diploma 5,3%, Strata 2 (S2) 6,1%, Strata 3 0% dari total kuesioner yang telah di isi oleh responden.

**Tabel 4**  
**Data Responden Berdasarkan Jabatan**

<b>No</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Prosentase</b>
1	Bendahara	19	16,7%
2	Kasubag Keuangan	27	23,7%
3	Kasubid Akuntansi	1	0,9%
4	Pengurus Barang	14	12,3%
5	Staff Keuangan	53	46,5%
Jumlah		114	100%

Sumber: Primer Data diolah, 2019

Responden yang mengisi kuesioner peneliti terdiri dari berbagai posisi jabatan diantaranya bendahara 19 orang atau 16,7%, Kasubag Keuangan 27 orang atau 23,7%, Kasubid Akuntansi 1 orang atau 0,9%, Pengurus barang atau 14%, Staff Keuangan 53 orang atau 46,5%. Hal ini berkaitan dengan tingkat pendidikan para responden yang mengisi kuesioner memiliki pendidikan terakhir Strata 1 (S1) dikarenakan para Kasubag Keuangan dan Kasubid Akuntansi harus memiliki pendidikan terakhir minimal Strata 1 (S1).

### **Deskripsi Jawaban Variabel Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam penelitian ini terdiri dari 23 pertanyaan berdasarkan 3 indikator yaitu pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), sikap (*attitude*) yang diisi oleh responden dapat disajikan pada tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5  
Data Responden Berdasarkan Kompetensi Sumber Daya Manusia

No.	Indikator	1	2	3	4	5	Mean Skor
1	KSDM.1	0	3	4	46	61	4.45
2	KSDM.2	0	0	6	69	39	4.29
3	KSDM.3	0	0	8	57	49	4.36
4	KSDM.4	0	0	12	53	49	4.32
5	KSDM.5	0	0	11	50	53	4.37
6	KSDM.6	0	1	7	53	53	4.39
7	KSDM.7	0	0	9	46	59	4.44
8	KSDM.8	0	1	5	54	54	4.41
9	KSDM.9	0	0	4	45	65	4.54
10	KSDM.10	0	0	4	48	62	4.51
11	KSDM.11	1	0	6	74	33	4.21
12	KSDM.12	1	1	7	63	42	4.26
13	KSDM.13	1	0	7	60	46	4.32
14	KSDM.14	1	0	15	52	46	4.25
15	KSDM.15	1	0	18	53	42	4.18
16	KSDM.16	3	1	13	60	37	4.11
17	KSDM.17	6	17	20	39	32	3.65
18	KSDM.18	2	11	24	43	34	3.84
19	KSDM.19	4	6	19	49	36	3.94
20	KSDM.20	0	9	22	45	38	3.98
21	KSDM.21	3	5	18	49	39	4.02
22	KSDM.22	1	7	17	47	42	4.07
23	KSDM.23	1	8	17	48	40	4.04
24	KSDM.24	0	0	2	33	79	4.68
25	KSDM.25	0	1	6	45	62	4.47
<b>TOTAL MEAN</b>							<b>4,24</b>

Sumber: Primer Data diolah, 2019

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia masuk dalam kategori sangat baik karena memiliki rata-rata 4,24 hal ini disebabkan banyak responden yang mampu menjawab setuju dalam menjalankan setiap kategori yang ada dalam indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia.

#### Deskripsi Jawaban Variabel Pengaruh *Good Governance*

Variabel *Good Governance* terdiri dari 10 pertanyaan berdasarkan 5 indikator yaitu Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Responsibilitas (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*) yang diisi oleh responden dapat disajikan pada tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6  
Data Responden Berdasarkan *Good Governance*

No.	Indikator	1	2	3	4	5	Mean Skor
1	GG.1	0	0	4	51	59	4.48
2	GG.2	0	2	8	65	39	4.24
3	GG.3	0	5	6	54	49	4.29

4	GG.4	0	1	4	71	38	4.28
5	GG.5	0	0	6	63	45	4.34
6	GG.6	0	0	7	60	47	4.35
7	GG.7	0	0	5	64	45	4.35
8	GG.8	0	0	5	67	42	4.32
9	GG.9	0	0	8	56	50	4.37
10	GG.10	0	0	4	54	56	4.46
11	GG.11	0	0	5	48	61	4.49
12	GG.12	0	0	5	49	60	4.48

Sumber: Primer Data olah, 2019

### Deskripsi Jawaban Variabel Pengaruh *E-Government*

*E-government* memiliki 8 pertanyaan berdasarkan 5 indikator seperti penggunaan secara optimal dari komputer dan perangkat lunak ,aplikasi *software* yang digunakan, proses akuntansi secara komputerisasi, laporan akuntansi dan manajerial yang terintegrasi, perawatan perangkat yang digunakan, diisi oleh responden dapat disajikan pada tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7  
Data Responden Berdasarkan *E-Government*

No.	Indikator	1	2	3	4	5	Mean Skor
1	<i>Egov.1</i>	0	0	2	78	34	4.28
2	<i>Egov.2</i>	0	0	7	69	38	4.27
3	<i>Egov.3</i>	0	1	3	74	36	4.27
4	<i>Egov.4</i>	0	1	3	65	45	4.35
5	<i>Egov.5</i>	0	0	4	62	48	4.39
6	<i>Egov.6</i>	0	0	4	60	50	4.40
7	<i>Egov.7</i>	0	0	3	66	45	4.37
8	<i>Egov.8</i>	0	2	3	46	63	4.49

Sumber: Primer Data diolah,2019

### Deskripsi Jawaban Variabel Kualitas Laporan Keuangan

Variabel dependen Kualitas Laporan Keuangan terdiri dari 4 Indikator seperti relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami diisi oleh responden dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 8  
Data Responden Berdasarkan Kualitas Laporan Keuangan

No.	Indikator	1	2	3	4	5	Mean Skor
1	KLK.1	0	0	1	72	41	4.35
2	KLK.2	0	0	2	72	40	4.33
3	KLK.3	0	1	2	70	41	4.32
4	KLK.4	0	0	2	72	40	4.33
5	KLK.5	0	0	2	57	55	4.46
6	KLK.6	0	0	0	65	49	4.43
7	KLK.7	0	0	4	50	60	4.49
8	KLK.8	0	0	1	56	57	4.49
9	KLK.9	0	0	1	54	59	4.51
10	KLK.10	0	0	1	48	65	4.56
11	KLK.11	0	0	0	45	69	4.61

Sumber: Primer Data diolah, 2019

## Analisis Data dan Pembuktian Hipotesis

Untuk membuktikan kebenaran data yang diperoleh dapat diukur dengan uji validitas dan reabilitas untuk mengetahui kualitas data yang diperoleh dapat diuraikan dengan jelas sebagai berikut:

### Hasil Analisis Data

#### Analisis Regresi Linier berganda

Tabel 9  
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
Kontanta	1,005	0,243
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,141	0,060
<i>Good Governance</i>	0,303	0,072
Penerapan <i>E-Government</i>	0,349	0,078

Sumber: Primer Data diolah, 2019

Tabel 16 memperlihatkan perolehan hasil uji regresi berganda yang dapat diuraikan sebagai berikut:

$$Y = 1,005 + 0,141KSDM + 0,303 GG + 0,349 X3 + e \dots\dots\dots(2)$$

Dari hasil persamaan diatas nampak nilai konstanta yang diperoleh 1,005, dapat diartikan bahwa pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, *Good Governance*, dan *E-government* dinyatakan konstan, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan sebesar 1,005. Variabel kompetensi sumber daya manusia memperoleh nilai sebesar 0,141, hal ini dapat disimpulkan penyelenggaraan kompetensi sumber daya manusia akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan dapat meningkat sebesar 0,141 dimana variabel yang lain konstan.

Variabel *Good Governance* diperoleh hasil analisis sebesar 0,303, yang artinya dimana *good governance* meningkat, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,303 yang mana variabel lain dalam penelitian ini konstan. Sedangkan untuk variabel penerapan *e-government* memperoleh nilai 0,349, dapat diartikan adanya peningkatan dalam penerapan *e-government*, akan berdampak pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga meningkat dengan besaran peningkatan sebesar 0,349.

#### Uji F Untuk Menguji Model

Uji F digunakan untuk menguji model. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ( $\alpha=5\%$ ) (Ghozali, 2011). Langkah – langkah dalam uji F dijelaskan sebagai berikut :

1. Perumusan hipotesis  
H0 : Model dikatakan tidak fit.  
H1 : Model dikatakan fit.
2. Menentukan taraf signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 0.05
3. Memperoleh nilai Sig-F dengan menggunakan program SPSS
4. Penarikan kesimpulan
  1. Jika nilai Sig-F < 0.05, maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diterima
  2. Jika nilai Sig-F ≥ 0.05, maka H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>1</sub> ditolak

**Tabel 10**  
**Hasil Uji F**

Model	Sum of Square	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	7.916	3	2.639	67.944	.000
Residual	4.272	110	0.39		

Sumber: Primer Data diolah, 2019

Dari data diatas dapat diketahui bahwa tingkat signifikansi dibawah 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang diujikan fit.

### Uji R<sup>2</sup>

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) bertujuan untuk mengetahui tingkat ketepatan perkiraan dalam analisis regresi. Pengujian ini mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap naik turunnya variasi nilai variabel dependen. Tingkat ketepatan regresi dinyatakan dalam koefisien determinasi majemuk (R<sup>2</sup>) yang nilainya antara 0 sampai dengan 1 ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ). Semakin besar nilai R<sup>2</sup>, maka semakin besar variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independen. Sebaliknya, makin kecil nilai R<sup>2</sup>, maka semakin kecil variasi variabel dependen yang dapat di jelaskan oleh variasi variabel independen. Hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 11**  
**Hasil Uji R<sup>2</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,806	0,649	0,640	0,19707

Sumber: Primer Data diolah, 2019

Dari data diatas dapat diketahui bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia, *Good Governance*, *E-government* mampu menjelaskan variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0,649 atau 64% sedangkan sisanya atau 36% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel independen yang digunakan dalam penelitian.

### Uji t

**Tabel 12**  
**Hasil Uji t**

Model	T	Sig.
Kompetensi Sumber Daya Manusia	2,336	0,021
<i>Good Governance</i>	4,212	0,000
<i>E-Government</i>	4,489	0,000

Sumber: Primer Data diolah, 2019

Dari hasil tabel 19 diatas terdapat pengaruh signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat yang dibuktikan dengan tingkat probabilitas lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan uji t variabel independen Kompetensi Sumber Daya Manusia, *Good Governance* dan *E-government* berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

### Pembahasan

**Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusiaterhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya**

Hipotesis pertama ( $H_1$ ) menyatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah di OPD Kota Surabaya. Dengan demikian penelitian yang dihasilkan dapat dibuktikan dengan adanya pengaruh kompetensi sumber daya manusia dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Hasil ini mencerminkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia yang dijalankan dengan baik berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Surabaya. Indikator-indikator yang baik pada variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia dapat mencerminkan organisasi perangkat daerah yang baik dapat direfleksikan melalui indikator yang berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap oleh pegawai negeri sipil bagian keuangan di tiap organisasi perangkat daerah di Kota Surabaya. Indikator-indikator tersebut sangat penting untuk diterapkan, terutama untuk pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia yang baik direfleksikan dengan pengaruh tersebut kepada masyarakat sehingga laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan bisa tetap baik. Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan peran penting dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sehingga laporan keuangan pemerintah daerah tetap baik ketika Badan Pemeriksa Keuangan melakukan Pemeriksaan (*Auditee*) opini Wajar Tanpa Pengecualian bisa di dapatkan.

Hasil Penelitian ini sesuai dengan penelitian (Nurillah dan Muid, 2014) yang menyatakan, Sumber Daya Manusia merupakan human capital di dalam organisasi. Human capital merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan *economic rent*. *Human capital* merupakan sumber inovasi dan gagasan. Karyawan dengan *human capital* tinggi lebih memungkinkan untuk memberikan layanan yang konsisten dan berkompentensi tinggi, menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

### **Pengaruh *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya**

Hipotesis kedua ( $H_2$ ) menyatakan bahwa *good governance* memiliki pengaruh positif dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang ada pada pemerintah daerah Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan *good governance* memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di OPD Kota Surabaya.

Cerminan dari setiap organisasi perangkat daerah dapat digambarkan melalui item indikator yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kesetaraan dan kewajaran penyelenggaraan pada setiap aparat sipil negara dimasing-masing dinas keuangan yang ada pada setiap OPD di Kota Surabaya merupakan faktor yang penting dalam penerapan maupun penyelenggaraan *good governance* yang berdampak pada masyarakat, dimana laporan keuangan pemerintah daerah yang selama ini diperoleh dapat dengan pasti untuk dapat di pertanggung jawabkan, yang merupakan tuntutan akan adanya transparansi dari setiap organisasi maupun tata kelola keuangan.

Hasil ini yang mendukung atas penelitian yang telah dilakukan oleh (Yusniar, Darwanis, Abdullah 2017) sistem akuntansi pemerintahan, pengendalian intern dan *good governance* secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dimana, nilai  $R_{Square}$  sebesar 0,731. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sistem akuntansi pemerintahan, pengendalian intern dan *good governance* berpengaruh kuat terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 73,1%.

### **Pengaruh *E-government* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya**

Hasil yang diperoleh dari hipotesis ketiga ( $H_3$ ), juga menyatakan adanya pengaruh positif dalam penerapan *e-government* terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintahan

daerah yang ada di OPD Kota Surabaya. Hal ini terbukti bahwa penerapan *e-government* dapat mempengaruhi secara positif kualitas laporan keuangan daerah pada lingkup OPD Kota Surabaya.

Dimana jika penerapan *e-government* dilaksanakan dengan sungguh-sungguh serta konsisten akan menghasilkan kebaikan bagi aparatur sipil negara dalam setiap laporan keuangan yang dibuat serta adanya penguasaan teknologi yang memadai dalam mendukung secara efektif dan efisien. Dimana masing-masing indikator yang mendukung adalah adanya penggunaan secara optimal dari komputer dan perangkat lunak, adanya kemudahan dalam aplikasi *software* yang digunakan, adanya proses akuntansi secara komputerisasi, serta terintegrasinya laporan akuntansi dan manajerial, dan tak luput pula perawatan perangkat yang digunakan secara berkala. Hasil penelitian ini sesuai dengan (Landau, Siti Nurannisa 2018) yang menyatakan bahwa pengaruh positif antara penggunaan teknologi informasi terhadap kualitas informasi akuntansi.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terbukti dengan adanya pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan yang ada di Kota Surabaya. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan ditunjukkan akan adanya keberhasilan pada pemerintah daerah di Kota Surabaya yang berupa opini wajar tanpa pengecualian pada periode 2018, tidak luput dari semakin baiknya kualitas kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki.

Variabel *good governance* juga memperoleh bukti adanya pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan yang terdapat pada pemerintah daerah Kota Surabaya, sehingga memperoleh opini wajar tanpa pengecualian pada periode yang sama yaitu tahun 2018. Hasil ini mencerminkan adanya penerapan *good governance* secara konsisten, sehingga dampaknya dapat dilihat dari kualitas hasil dalam laporan keuangan yang transparan, akuntabilitas.

Selain itu variabel *e-government* juga membuktikan adanya pengaruh positif dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang ada pada lingkungan pemerintah daerah Kota Surabaya, artinya dengan adanya keseriusan pemerintah daerah untuk menerapkan *e-government* dengan baik hal ini merupakan salah satu yang mengindikasikan dalam proses pencapaian kualitas laporan keuangan dalam memperoleh opini wajar tanpa pengecualian.

### **Saran**

Saran dari hasil pengujian ini yakni yang pertama untuk Pemerintah Kota Surabaya: 1) Memberikan diklat dan ijin belajar bagi pegawai negeri sipil pemerintah Kota Surabaya yang bertugas sebagai pembuat laporan keuangan pemerintah daerah. 2) Memperhatikan latar belakang pendidikan bagi para pegawai negeri sipil pemerintah Kota Surabaya yang akan naik jabatan khususnya yang akan menjabat pada Kepala Staff atau Kepala Seksi Keuangan. Diharapkan yang memiliki latar belakang Ekonomi atau Akuntansi. 3) Meningkatkan *Good Governance* yang sudah berjalan baik sehingga tujuan pemerintah Kota Surabaya untuk menjadi *Smart City* dapat dirasakan semua masyarakat Kota Surabaya. 4) Meningkatkan *E-government* sehingga tetap sebagai faktor pendukung laporan keuangan pemerintah daerah kota Surabaya dan menjadikan *E-government* syarat utama berkembangnya *Smart City* di Kota Surabaya.

Saran yang kedua yakni untuk Akademisi: 1) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel yang dirasa dapat mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya. 2) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah penyebaran kuisioner kepada seluruh organisasi pemerintah daerah yang ada di Kota Surabaya. 3) Bagi peneliti selanjutnya harap menambahkan deskriptif responden tambahan yaitu latar belakang jurusan pendidikan responden

## DAFTAR PUSTAKA

- Andini, D dan Yusrawati. 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 24, No. 1.
- Anshori, M dan S. Iswati. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya : Airlangga University Press (AUP).
- Arikunto & Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bastian, I. 2005.2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Penerbit Erlangga. Yogyakarta.
- Erlina, dkk. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. 2002. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (4th ed.)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hakim, L. 2012. *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah*. Setara Press. Malang
- Heryana, T dan S.K Dewi. 2013. Pengaruh Penerapan E-Government Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah di Pemerintah Kabupaten Cianjur. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan UPI* 1 (1) 38-49.
- Indriasih, D. 2014. The Effect of Government Apparatus Competence and the Effectiveness of Government Internal Control Toward the Quality of Financial Reporting in Local Government. *Research Journal of Finance and Accounting*. Vol.5, No.20 ISSN 2222-2847
- Jensen, M.C. dan W.H. Meckling .1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3 (1976) 305-360. University of Rochester, Rochester, NY 14627, U.S.A.
- Kesuma, D.P, C. Anwar, dan Darmansyah. 2017. Pengaruh Good Governance, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada Satuan Kerja Kementerian Pariwisata. *Jurnal Ilmiah WIDYA Ekonomika*. Volume 1 Nomor 2 Desember 2017
- Koiman, J. 2009. *Governing as governance*. SAGE Publishing.
- Landau, S.N. 2018 Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi, Keahlian Pemakai dan Intensitas Pemakaian terhadap Kualitas Informasi Akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Medan. *Skripsi Repository Akuntansi Universitas Sumatra Utara*.
- Mangkunegara, A.P .2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nagari, H.B. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survey pada Dinas Pemerintah Daerah Kota Bandung). *Skripsi Program Studi Akuntansi S1*. Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2006. Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*. Vol. 2, No. 1, Mei 2006.

- Nurillah, A.S dan D. Muid. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok). *Diponegoro Journal of Accounting* Volume 3 Nomor 2 Tahun 2014. ISSN : 2337-3806
- Nordiawan, D., dan A. Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik.Edisi Kedua*. Jakarta:Salemba Empat
- Purwandani, S., Maesaroh dan Rihandoyo. 2013. Analisis Penerapan Electronic Government Di Kabupaten Pati. *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Rahayu, M dan B. Sari. 2018. Faktor-Faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. *Jurnal Upi Yai*, Vol.2, No. 2
- Safitri, R.T. 2009. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Semarang). *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Sari,I.M. dan Tamrin. 2016. Pengaruh Good Government Governance dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Keuangan Fakultas Ekonomi dan BisnisUHO*. Vol 1 No 1.
- Sanusi, A. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sedarmayanti. 2007. *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Siregar, B. 2015. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)*.Edisi Pertama.Yogyakarta:Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Siwambudi I.G.N, dan Y. Wirawan Gerianta, Badera I Nyoman Dewa. 2017. Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Pada Kualitas Laporan Keuangan. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 6.1: 385-416. ISSN:2337-3067.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, A. 2008. *Sistem Informasi Akuntansi, Konsep dan Pengembangan Berbasis Komputer*. Bandung: Lingga Jaya.
- Sutrisno, E. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana
- Styles, A. K., & Tennyson, M. 2007. The accessibility of financial reporting of u.s municipalities on the internet. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*. 19 (1), 56- 92.
- Winda, E. 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar (Survei Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Kampar). *Skripsi* Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UR. Riau
- Wibowo. 2016. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Yusniar, Darwanis, dan S.Abdullah. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian Intern Terhadap Good Governance dan Dampaknya Pada Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada SKPD Pemerintah Aceh). *Jurnal Administrasi Akuntansi : Program Pascasarjana UNSYIAH*. Vol 5 No 2
- Yosefrinaldi. 2008. Pengaruh Kapasitas Intelektual Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern. *Jurnal Akuntansi, Universitas Negeri Padang*

- Yosefrinaldi. 2013. Pengaruh kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan variable intervening pengendalian intern pemerintah (Studi Empiris pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Se-Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi UNP*. Vol 1 no (1).
- Zeyn,.E. 2011. Pengaruh good governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan* ISSN: 2088-0685. Vol 1 No 1, April 2011 Pp 21-37.
- . 2003. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government*.
- . 2010. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)
- . 2011. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government*.
- . 2018. *IHPS I tahun 2018 Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2018*. [www.bpkri.co.id](http://www.bpkri.co.id).